

**PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) MELALUI
SUB-PROGRAM 4 : DRUGS AND HEALTH DALAM MENANGANI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI MYANMAR**

Peneliti: Adinda Chandra Fadhillia

Email: adinda.chandr@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP, MA

Email: irwan.iskandar@lecturer.unri.ac.id

Bibliografi: 13 Dokumen Resmi, 20 Jurnal, 12 Buku, 1 Disertasi, 32 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study discusses the roles of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) through sub-programme 4 : Drugs and Health in addressing drug abuse in Myanmar. Myanmar is the world's second-largest producer of drugs with worrying cases of drug abuse followed by the government's ineffective efforts in addressing the issue. Therefore, UNODC cooperates with the Government of Myanmar by carrying out its roles and following the mandate given to support member states in their efforts to address drug use by implementing scientific evidence-based program, using public health approach while fully respecting all human rights. This study aims to answer the research issues regarding the role of UNODC through sub-program 4 : Drugs and Health in addressing drug abuse in Myanmar.

This research uses a qualitative method, Neo-liberalism Institutionalism approach, and theory of International Organization Roles with International System as the level of analysis. To analyse this case, the author collects data from books, journals, websites, and annual reports of UNODC. The findings of this study resulted in several things namely that UNODC have roles as instrument, arena and independent actors.

UNODC's roles as an instrument in Myanmar includes drug prevention, development of national drug policy, development of community-based service to raise awareness from the community, assisting in alternative development to help opium farmers escape the poverty trap of engaging in illicit crops and the risk of drug use, as an arena through a number of discussion and consultation and lastly, making its own decision in carrying out its activities in Myanmar as an independent actor.

Keywords : Roles of United Nations Office on Drugs and Crime, Myanmar, Neo-Liberalism Institutionalism

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan suatu studi yang mengangkat salah satu aspek kerjasama internasional dengan membahas peran UNODC dalam kerjasamanya

bersama Pemerintah Myanmar untuk menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba atau yang biasa disebut dengan *drug abuse* merupakan

salah satu permasalahan global yang telah lama berlangsung di seluruh belahan dunia dan menjadi isu keamanan yang meresahkan karena membawa dampak buruk bagi individu, komunitas maupun negara.

Di kawasan Asia Tenggara, Myanmar menjadi salah satu negara dengan permasalahan narkoba yang cukup intens. Terletak pada wilayah *Golden Triangle* dan merupakan penghasil opium terbesar di Asia tenggara dan terbesar kedua dunia setelah Afghanistan mendorong tingginya angka pengguna dan berdampak pada naiknya kasus HIV/AIDS serta Hepatitis C. Permasalahan yang mengakar ini dimulai dari sejarah kedatangan Inggris yang pertama kali memperkenalkan Myanmar kepada narkoba jenis opium di akhir abad ke-20. Di tahun 1852, Inggris membawa masuk opium ke Myanmar dengan kuantitas yang cukup besar dari India. Opium impor ini kemudian dijual dengan melakukan monopoli perdagangan oleh penjajah Inggris. Seiring perkembangannya, wilayah Burma bagian timur yaitu negara bagian Shan mulai menanam opium.¹

Opium pada zaman dahulu digunakan di semua kalangan dengan cara membuat opium menjadi rokok dan sebagai obat tradisional dipercaya untuk mengatasi diare, disentri dan penyakit lainnya.² Berubahnya tren dan permintaan pasar kepada obat-obatan sintesis seperti *methamphetamine* atau meth di Myanmar menyebabkan penggunaan meth yang menyebar dengan cepat dari kalangan remaja ke tingkat pekerja dan mayoritas memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Mulai dari pekerja

musiman seperti penambang giok sampai pekerja stabil.

Berdasarkan laporan UNODC, jumlah pasien yang ada di pusat rehabilitasi narkoba dengan masalah narkoba jenis opium dan heroin pada tahun 2017 sampai 2019 masih menjadi mayoritas dibandingkan dengan pasien yang memiliki masalah narkoba jenis lain. Namun secara keseluruhan, jumlah individu yang menjadi pasien di pusat rehabilitasi di Myanmar terhitung fluktuatif dimana terjadi peningkatan dan penurunan. Sedangkan dalam perkiraan UNODC, pemakai narkoba di seluruh Myanmar mencapai lebih dari 300.000 orang dengan 4,300-5,600 merupakan perempuan dan 240.000 orang dari perkiraan tersebut merupakan pasien HIV/AIDS.

Myanmar dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan produksi narkoba yang tinggi memancing tekanan dari komunitas internasional. Banyak negara barat yang memberikan sanksi ekonomi dan politik untuk Myanmar di masa lalu sehingga untuk memenuhi tekanan internasional tersebut, Myanmar mengambil langkah cepat namun tidak efektif yaitu dengan pengurangan ladang opium dan tindakan tegas bagi pihak yang terlibat dalam rangka menuju Myanmar sebagai negara bebas narkoba.

Selain itu, penanganan yang ditujukan untuk pengguna narkoba di Myanmar terhambat oleh kurangnya program yang efektif, sumber daya manusia yang berpengalaman dan kurangnya biaya untuk memenuhi sarana pra-sarana di pusat-pusat kesehatan dan rehabilitasi. Kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah Myanmar untuk melawan narkoba bersifat menekan membuat banyak individu yang berusaha mencari bantuan untuk mengatasi ketergantungan narkoba berakhir di penjara serta menjalani masa hukuman yang panjang.

¹ Al Jazeera. 2019. "Myanmar cracking down on opium but conflicts push drug trade". Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/1/11/myanmar-cracking-down-on-opium-but-conflicts-push-drug-trade> pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 6:31 WIB.

² UNODC. Report. "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia : Latest developments and challenges". Mei 2020. Hlm. 67-70.

Penanganan pecandu narkoba tidak seharusnya ditangani dengan sudut pandang peradilan pidana namun ditangani melalui sudut pandang kesehatan publik (*public health*).³ Kerjasama Pemerintah Myanmar dan organisasi internasional UNODC dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di Myanmar berdasarkan *sub-program 4 : Drugs and Health* terlihat dari bantuan jangka panjang dan jangka pendek meliputi penyediaan informasi dengan laporan tahunan mengenai narkoba, peningkatan akses kepada pencegahan HIV, pelayanan kesehatan dan pusat rehabilitasi, menjembatani kerjasama Myanmar dan negara tetangga dengan permasalahan yang sama dan membantu perumusan kebijakan terkait dan implementasi di Myanmar.

Kerangka Dasar Teori

1. Neo-Liberal Institusionalisme

Untuk membahas penelitian ini, penulis menggunakan turunan perspektif Liberal yakni Neo-liberal Institusionalisme yang merupakan asumsi dan pemikiran dari Robert Keohane & Joseph Nye. Neo-liberalis institusionalisme menitikberatkan bahwa keinginan untuk bekerjasama dimiliki oleh negara-negara walaupun berada di dunia yang bersifat anarki. Kerja sama disebut sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan nasional masing-masing dengan memaksimalkan kepentingan absolut seluruh pihak. Negara akan lebih cenderung untuk menyesuaikan perilaku dan pilihan melalui proses koordinasi kebijakan dalam mewujudkan kerja sama tersebut.⁴

³ Cachia, R. & Lwin, T. M. (2019). *"Methamphetamine Use in Myanmar, Thailand and Southern China : Assessing Practices & Reducing Harms"*. (Amsterdam : Transnational Institute). Hlm. 1-2.

⁴ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles. 2015. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, 3rd ed. (Colorado : Lynne Rienner Publishers). Hal 9

Terdapat 4 asumsi dasar perspektif neo-liberal institusionalisme, antara lain :

- a. Negara adalah aktor rasional yang akan mencapai kepentingan mereka dengan maksimal.
- b. Negara melakukan kerja sama untuk mencapai *absolute gains* dalam lingkungan anarki.
- c. Kecurangan dan ketidakpatuhan negara adalah penghambat dari kerja sama.
- d. Negara akan memberikan loyalitas dan sumber daya kepada institusi jika kerja sama dirasa memberi keuntungan untuk mendapatkan kepentingan nasional.

Maka dari itu, perspektif ini menilai bahwa organisasi internasional dapat membantu meningkatkan kerjasama antar negara dimana organisasi internasional dan seperangkat aturannya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengatur tindakan suatu negara dalam bidang tertentu dimana organisasi internasional akan memperkuat kesepakatan internasional.⁵

2. Teori Organisasi Internasional

Tidak sedikit diantara dari pengamat yang berasumsi bahwa organisasi internasional memiliki peran yang cukup besar dalam memperengaruhi peristiwa internasional dengan menyelesaikan permasalahan negara yang muncul dan memfasilitasi kerja sama.⁶ Keberhasilan organisasi internasional dalam memecahkan permasalahan yang sedang dialami suatu negara serta kemampuannya dalam mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk bekerja sama. Selain itu, keberadaan organisasi ini

⁵ Robert H. Jackson & Georg Sorensen. 2007. *"Introduction to International Relations: Theories and Approaches"* (Oxford : Oxford University Press). Hlm 111-113.

⁶ Edward D. Mansfield and Jon C. Pevehouse. *"Democratization and International Organizations."* *International Organization* 60, no. 1 (2006). Hal. 137.

dipandang sebagai sarana untuk menangani masalah yang muncul dalam kerjasama tersebut.

Clive archer membagi peran organisasi internasional kedalam tiga kategori, antara lain :

- a. Organisasi Internasional sebagai instrumen. Sebagai pemegang peran instrumen, organisasi internasional dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional oleh masing-masing negara anggota yang mana dapat mempengaruhi pemikiran, tindakan negara sampai pada pemindahan urusan yang dapat dilimpahkan kepada organisasi internasional ketika dibutuhkan. Negara cenderung dapat bertindak logis untuk mengizinkan organisasi internasional bertindak dalam lingkup negara nya jika percaya bahwa kerja sama yang dijalankan dapat menghasilkan manfaat.
- b. Organisasi internasional sebagai arena. Sebagai arena, organisasi internasional dapat digunakan oleh Negara anggota sebagai wadah untuk membahas permasalahan yang akan ditangani. Organisasi internasional membantu menyediakan tempat untuk berdiskusi, berargumentasi, bekerjasama, bertukar pikiran dan bernegosiasi. Selain itu organisasi internasional dapat mempersiapkan informasi dan data, memberi saran dan solusi yang akan menghasilkan kesepakatan, pedoman dan kontrak.
- c. Organisasi internasional sebagai aktor independen. Dalam peran ini, organisasi internasional dipandang sebagai aktor yang mandiri karena dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Namun dalam hal ini, organisasi sebagai aktor independen digambarkan

sebagai aktor yang tindakannya tidak dinyatakan namun tetap dapat membuat keputusan yang koheren dalam lingkup kerjanya. Kapasitas organisasi internasional sebagai aktor independen tergantung dari resolusi, mandat dan perintah-perintah dari komponennya yang mendorong negara anggotanya untuk bertindak berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Dalam beberapa situasi, perwakilan dari organisasi internasional dapat mengambil keputusan lain dalam situasi genting dengan memberi solusi.⁷

Berdasarkan beberapa peran yang dimiliki organisasi internasional seperti yang telah dijabarkan, dalam konteks penelitian ini terdapat tiga peran yang relevan dengan peran UNODC sebagai sebuah organisasi internasional yang bertugas menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika di Myanmar, yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor independen.

Peran UNODC sebagai instrumen bagi Myanmar untuk mencapai keberhasilan dalam memecahkan permasalahan narkoba dilakukan melalui program-program, kerjasama dan penyediaan fasilitas. Begitu pula dengan peran UNODC sebagai arena yang mengupayakan isu norkotika di Myanmar sebagai suatu masalah kepada masyarakat agar mendapat perhatian dan solusi serta sebagai aktor yang mandiri dimana dalam implementasi nya, UNODC dapat mengubah suatu program yang telah disusun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

3. Level Analisa : Sistem Internasional

Laura Neack membagi level analisa menjadi tiga bagian yaitu Individu, Negara-

⁷ Archer. 1983. dalam Agung Banyu Perwita & Yani, Yanyan Mochamad. 2005. “*Pengantar Hubungan Internasional*”. (Bandung : Remaja Rosdakarya). Hal 95.

Bangsa dan Sistem Internasional. Dalam tingkatan terakhir, tingkat analisa sistem internasional mencakup hubungan bilateral, isu dan interaksi internasional, isu global serta interaksi multilateral antar negara. Dalam tingkat ini, peran yang dimainkan oleh organisasi regional dan internasional beserta aktor non-negara lainnya juga merupakan cakupan dari tingkat sistem internasional karena memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri sebuah negara.⁸ Maka alasan suatu negara mengambil suatu kebijakan yang berbeda dengan negara lain dipengaruhi oleh karakter dari sistem internasional tersebut.⁹

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data terkait akan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif sehingga dapat dihasilkan kesimpulan mengenai peran UNODC melalui *sub-country program 4 : Drugs and Health* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Myanmar 2017-2019.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dan mencari buku, artikel jurnal, catatan, media massa (cetak ataupun elektronik) maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu seperti skripsi dan

⁸ Laura Neack. 2008. "The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era". (Maryland : Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc). Hlm 11.

⁹ Anieri. 2012. Hal. 19 dalam Yessi Olivia. "Jurnal Transnasional". Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. Vol. 5 No. 1. Juli 2013. Hlm 896-898. Hlm. 901

proposal resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain itu, dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan publikasi resmi UNODC seperti laporan tahunan UNODC *Myanmar Opium Survey Report* dan *World Drug Report* serta website resmi pemerintah Myanmar yakni website Kementerian Kesehatan dan Olahraga Republik Persatuan Myanmar (www.mohs.gov.mm) dan website resmi UNODC (www.unodc.org).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Keterkaitan dalam Permasalahan Penyalahgunaan Narkoba

UNODC merupakan organisasi yang mengatur kontrol obat-obatan global yang dimulai dari pembentukan *The Commission on Narcotic Drugs* (CND) di tahun 1946, dilanjutkan dengan pembentukan *The International Narcotics Control Board* (INCB) di tahun 1961 dan *The United Nations Fund for Drug Abuse Control* (UNFDAC) di tahun 1970. Pada tahun 1990, dibentuk *the United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) yang menyatukan tiga entitas PBB sebelumnya.

Pada tahun 1997, dibentuk entitas lain yaitu *the United Nations Centre for International Crime Prevention* (CICP) yang akan digabungkan dengan UNDCP. Keduanya memiliki sistem manajerial yang serupa sehingga dapat saling berkolaborasi dalam hal pengawasan narkoba dan pencegahan kejahatan global. Di tahun 2002, kedua organisasi PBB yang disatukan tersebut berganti nama menjadi *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang bertahan sampai saat ini.¹⁰

¹⁰ Swedish International Development Cooperation Agency. (2004). "Working in Partnership with UNODC/UNDCP".

UNODC bekerja untuk memenuhi mandatnya dengan menuntun negara anggota dalam mereformasi sistem peradilan pidana untuk memperkuat hukum dan mempromosikan kestabilan dalam sistem peradilan pidana maupun memerangi ancaman kejahatan dan korupsi yang semakin meningkat.¹¹ Badan ini memiliki komitmen untuk memerangi ancaman dan mempromosikan perdamaian dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, keamanan serta keadilan untuk seluruh dunia. Dalam prosesnya, UNODC menawarkan bantuan secara praktis dan mendorong pendekatan dengan cakupan transnasional. Hal ini dilakukan karena permasalahan tersebut akan terlalu besar untuk diatasi oleh sebuah negara sendiri, maka diperlukan aktor lain di seluruh wilayah melalui program-program global serta memanfaatkan kerjasama dan hubungan antar kantor negara.

Agenda kerja UNODC dibagi menjadi lima area normatif antara lain kejahatan terorganisir transnasional, korupsi, sistem peradilan pidana yang efektif, terorisme dan permasalahan narkoba. Dalam area ini, UNODC berusaha mendampingi anggota untuk mengimplementasikan tiga konvensi PBB dan mengembangkan kebijakan nasional yang sesuai dengan standar. Selain itu, UNODC memberikan dukungan fasilitas yang dibutuhkan dan akses kesehatan bagi pengguna serta pengembangan mata pencaharian alternatif bagi petani opium. UNODC juga memastikan peningkatan informasi dan program-program berbasis bukti serta pelaporan data terkait penyelundupan, kasus penangkapan dan kemurnian narkoba.¹²

¹¹ WHO. "United Nations Office on Drugs and Crime". Diakses dari www.who.int/violenceprevention/about/participants/unodc/en/ pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 14:21 WIB.

¹² UNODC. 2019. "Annual Report 2018". Hal 81. Diakses dari https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/Annual-Report_2018.pdf pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 18:12 WIB.

Sekitar 95% pendanaan UNODC bersumber dari kontribusi sukarela dari negara-negara anggota, organisasi multilateral, sektor swasta dan sumber lainnya.¹³ Sebagai salah satu negara anggota UNODC, Myanmar telah terlibat jauh sebelum UNODC terbentuk. Hal tersebut terlihat dari kunjungan Tim Survei PBB ke Myanmar atas permintaan pemerintah Myanmar untuk melakukan survei atas kebutuhan sosial dan ekonomi di wilayah produksi opium tahun 1964. Terbentuknya UNFDAC sebagai cikal bakal UNODC pada tahun 1970 menjalankan mandatnya kembali mengunjungi Myanmar di tahun 1972 dengan tujuan untuk memahami bagaimana PBB dapat membantu usaha pemerintah dalam memperbaiki kebijakan tentang narkoba dan menurunkan penggunaan narkoba di Myanmar.¹⁴

Pada tahun 1991, UNFDAC setelahnya digantikan menjadi UNDCP atau Program Pengendalian Obat-Obatan Internasional PBB. Bekerja sama dengan UNDCP, Myanmar menjadi salah satu yang menandatangani Nota Kesepemahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai pengendalian narkoba yang dikenal dengan *Mekong Memorandum of Understanding* bersama negara wilayah Mekong lainnya. Salah satunya adalah terciptanya kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Myanmar, Thailand dan UNDCP dengan program pengurangan pemakaian narkoba serta pencegahan infeksi HIV di beberapa wilayah perbatasan pada tahun 1995.

Pendekatan yang ditujukan untuk membantu pecandu dan pengguna narkoba melalui program-program inovatif saat itu yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

¹³ UNODC. "Partnerships and Funding". Diakses dari www.unodc.org/unodc/en/donors/index.html pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 07:12 WIB.

¹⁴ UNODC. "The United Nations Fund for Drug Abuse Control". *Op, Cit.*

dan *Stepping Stones* (SS) yang digunakan untuk berinteraksi dan memahami komunitas di wilayah pedesaan.¹⁵ Tahun 1997, bersamaan dengan tergabungnya UNDCP dan CACP yang setelahnya akan berganti nama menjadi UNODC, Myanmar menjalankan program 10 tahun Pengendalian Obat-Obatan yang dinisiasi oleh agensi gabungan tersebut. Program tersebut menargetkan wilayah Shan dalam usaha untuk mengurangi dan memusnahkan opium melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Tahun 2000-2007, UNODC dengan telah didirikannya Kantor Negara UNODC Myanmar (COMYA) di Yangon memulai program dengan pendekatan berbasis masyarakat dengan mengeluarkan tiga fokus wilayah di Myanmar yang mencakup 30 desa.¹⁶

Permasalahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang di Myanmar

Myanmar atau yang dikenal dengan Burma dan Tanah Emas "*The Golden Land*" merupakan wilayah yang berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Bengal di bagian Barat Daya, berbatasan dengan Bangladesh di bagian Barat, India disebelah Barat Laut, Cina di bagian Utara dan Laos serta Thailand di bagian Timur. Lokasi strategis yang dimiliki oleh Myanmar ini mendorong perdagangan dan penyelundupan narkoba dari luar ataupun ke luar negeri. UNODC mencatat 33,100 hektar lahan di Myanmar merupakan perkebunan opium yang telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi 29,500 hektar di tahun 2019 (-11%).

Ditengah penurunan tersebut, ekspor produk seperti heroin dan tren permintaan obat-obatan sintesis metamfetamin tablet dan

¹⁵ UNODC. "*UNODC's History in Myanmar*". Diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/history.html> pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 15:05 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

kristal masih terus meningkat. Oleh karena itu, Myanmar masih tercatat sebagai negara produksi opium dan heroin utama di wilayah Asia Tenggara dan Australia.¹⁷ Dengan harga produk-produk tersebut yang semakin terjangkau, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk mendapatkan narkotika. Tahun 2017, harga heroin per kg mencapai \$5,880, 2018 turun menjadi \$2,667 dan menurun menjadi 2,747. Sedangkan meth jenis tablet berada di harga 2\$ per tablet di tahun 2017 – 2018 dan naik menjadi \$2.1 di tahun 2019. Harga meth dengan jenis Kristal dihitung per gramnya berkisar antara \$20-24 di tahun 2017. Di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dengan kisaran \$18 dan \$14.3 di tahun selanjutnya.¹⁸ Pengguna di Myanmar rata-rata merupakan tipe *poly drug user* atau pengguna lebih dari satu jenis narkoba. Alasan yang paling mempengaruhi adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan jenis yang diinginkan dengan harga yang murah sehingga mereka mencampurkan berbagai macam jenis zat adiktif untuk mendapatkan efek yang diinginkan.¹⁹

Setidaknya minimal satu anggota keluarga dari setiap rumah (terutama di wilayah Kachin) merupakan pengguna narkoba. Rawat inap akibat penggunaan narkoba di kebanyakan rumah sakit menempati peringkat 8 sebagai penyebab pasien dirawat. Penyakit yang ditangani antara lain permasalahan tingkah laku, overdosis, penyakit menular seperti HIV, Tuberkulosis dan Hepatitis oleh PWID (*People Who Inject Drugs*).

¹⁷ UNODC. Report. Myanmar Opium Survey 2020. Februari 2021. Hal 8

¹⁸ UNODC. Report. Synthetic Drugs in East and Southeast Asia. 2021. Hal 71

¹⁹ Renaud Cachia & Thura Myint Lwin. Januari 2019. "Methamphetamine Use in Myanmar, Thailand and Southern China : Assessing Practices & Reducing Harms". (Amsterdam : Transnational Institute). Hlm. 3.

Permasalahan ini memunculkan pula sentimen negatif dari dalam komunitas. Gambaran sebagai orang yang tidak bermoral dengan tingkah laku menyimpang serta berkaitan erat dengan aktifitas kriminal, orang yang buruk dan lemah serta tidak taat kepada kepercayaan melekat kuat pada pengguna narkoba yang mana sangat berbahaya karena dapat menurunkan kapasitas, kepercayaan diri dan membuat mereka menjauhkan diri dalam berpartisipasi pada kehidupan bermasyarakat serta komunitas dan mendorong mereka kepada isolasi.²⁰

Meskipun pemerintah Myanmar telah lama mengupayakan solusi atas permasalahan narkoba di negaranya, faktor-faktor pendorong penyalahgunaan narkoba di Myanmar masih sulit untuk ditangani seperti:

1. **Kemiskinan.** Menurut data dari *Asian Development Bank, Myanmar Living Conditions Survey (MLCS)* menunjukkan 24.8% dari populasi di Myanmar berada di garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan 2.7 kali lebih tinggi (30.2%) dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan (11.3%).²¹ Tingginya kemiskinan, pengangguran dan pemindahan merupakan dampak dari konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar sehingga penduduk di wilayah bersengketa terpaksa berpindah dan meninggalkan pekerjaan mereka. Penduduk yang berada di daerah terpencil memilih mengembangkan perkebunan opium yang akan dibeli oleh pemasok narkoba sebagai bahan baku untuk mencukupi kebutuhan

²⁰ MDM. 2018. Report. Perceptions About Drug Use and Harm Reduction in Kachin, Myanmar. Hal 27-31

²¹ ADB. "Poverty Data : Myanmar". Diakses dari <https://www.adb.org/countries/myanmar/poverty#accordion-0-5> pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10:15.

sehari-hari. Sedangkan beberapa lainnya menjadi penambang yang biasanya akan dibayar dalam bentuk heroin.²²

2. **Stigma.** Stigma, penolakan dari komunitas dan diskriminasi membuat banyak pengguna narkoba enggan untuk mencari bantuan dan menjangkau layanan kesehatan. Sehingga pada akhirnya banyak pengguna yang tetap berada dalam lingkaran ketergantungan dan menurunkan peluang mereka untuk sembuh serta membahayakan kesehatan diri sendiri dan keluarganya karena tidak terjangkau oleh layanan kesehatan.²³
3. **Keterbatasan informasi dan layanan kesehatan sesuai standar.** Akibat terbatasnya pengetahuan mengenai narkoba, masyarakat terutama remaja memulai penggunaan zat adiktif sejak dini untuk mencari pengalaman dan mengisi rasa keingintahuan mereka. Terbatasnya akses kepada layanan *Harm Reduction* berbasis komunitas dan humanis juga mengakibatkan sulitnya penggunaan narkoba untuk diatasi dan mendidik masyarakat di wilayah terpencil merupakan hal yang masih sulit dilakukan.²⁴ Beberapa pengguna juga memilih untuk datang ke kamp rehabilitasi yang dijalankan oleh organisasi berbasis kepercayaan yang tidak sesuai dengan standar

²² Renaud Cachia & Thura Myint Lwin. 2019. *Op, Cit.* Hlm. 3-12.

²³ Relief Web. 2016. "Myanmar: Fighting Stigma, Preventing Disease". Diakses dari <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-fighting-stigma-preventing-disease> pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 07:05.

²⁴ Shaw, David. 2017. "Drugs and Bullets in Myanmar". Diakses dari <https://www.aljazeera.com/features/2017/2/8/drugs-and-bullets-in-myanmar> pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 08:03.

internasional. Banyak masyarakat yang khawatir akan stigma dan diskriminasi yang akan didapat dari lingkungan sekitar karena mendaftar sebagai pendaftar yang diwajibkan oleh hukum sehingga memilih untuk datang ke pusat rehabilitasi sekitar.²⁵

4. **Hukum yang tidak efektif.** Peraturan di Myanmar tentang Narkotika dan Zat Psikoaktif (1993) merupakan salah satu kebijakan yang mengatur penggunaan, perkebunan, produksi, penyelundupan sampai hukuman untuk pengguna narkoba yang gagal mendaftar ke pusat pelayanan kesehatan. Ayat 15 telah membawa banyak pengguna narkoba ke penjara akibat tidak mendaftarkan diri ke pusat pelayanan kesehatan dan dijatuhi hukuman 3-5 tahun penjara. Jika hukum yang ada di Myanmar tidak mendekriminalisasi pengguna dengan ancaman kurungan penjara, maka akan lebih banyak pengguna narkoba yang tidak akan takut untuk mencari bantuan dan akses kepada layanan kesehatan.²⁶

Peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melalui *Sub-country Program 4: Drugs and Health* dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Myanmar

Dalam *sub-country program 4* ini, UNODC mengeluarkan dana sebesar \$5,479,700 Dolar AS dengan pendonor utama UNAIDS dan INL. Penyusunan kegiatan dari periode 2017-2019 dilakukan oleh UNODC dengan sesi konsultasi dan persetujuan dari pemerintah Myanmar selama 6 bulan untuk mendapatkan persetujuan dokumen formal. Kegiatan yang

²⁵ Kramer, Tom. 2017. “*Journal of Drug Policy Analysis*”. The Current State of Counternarcotics Policy and Drug Reform Debates in Myanmar. Vol 10 No 1. Hal 1-14

²⁶ Renaud Cachia & Thura Myint Lwin. 2019. Op.Cit, Hal 28-29.

tercakup dalam program ini antara lain aktivitas peningkatan kesadaran, workshop, pendampingan revisi kebijakan, dukungan perjalanan, survei, training, mentorship, bantuan langsung dan laporan-laporan penelitian dari UNODC yang dapat digunakan pemerintah untuk memahami seluruh situasi dan respon yang harus diambil untuk menangani hal tersebut di masa mendatang.

Selama tahun 2017-2019, dari empat status (*yet to be achieved, partially, achieved atau not yet measurable*), implementasi sub-program 4 *Drugs and Health* di Myanmar tahun 2017-2019 memiliki status *partially achieved* atau sebagian tercapai menuju *fully achieved* (tercapai sepenuhnya) karena beberapa implementasi program yang terhambat pelaksanaannya. Hasil dari keseluruhan penerapan sub-program 4 *Drugs and Health* di Myanmar periode 2017-2019 ini dinilai memuaskan walaupun dipengaruhi oleh kurangnya dana, kondisi politik Myanmar, serta terbatasnya staff di COMYA (*Country Office in Myanmar*), penerapan dan hasil yang didapatkan merupakan pencapaian yang besar.²⁷

Peran UNODC sebagai Instrumen

Dalam memerankan peran ini, UNODC diharapkan dapat menjadi alat bagi Myanmar dalam mencapai tujuan dan kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan narkoba. Dalam pencegahan penggunaan narkoba di Myanmar. UNODC melaksanakan perannya sebagai instrumen bersama UNICEF dalam program *the UPSHIFT* pada tahun 2018. Kegiatan dari proyek ini mencakup pelatihan dalam pencegahan penggunaan narkoba, bimbingan dan pendampingan dari mentor-

²⁷ UNODC. Independent Evaluation Section. “*Final Independent In-Depth Evaluation : Regional Programme for Southeast Asia*”. 2020. (Vienna : United Nations). Hal. 1-10.

mentor terbaik dari UNODC dan UNICEF bagi relawan untuk memilih dan mengidentifikasi pihak pemangku kepentingan dalam lingkup lokal seperti kepala sekolah, anggota departemen pendidikan, pejabat dari departemen kesejahteraan sosial, komite kontrol penyalahgunaan narkoba serta anggota parlemen.

Selain mengacu kepada aktor tersebut, relawan akan membentuk tim utama yang akan terbagi kembali kedalam beberapa kelompok untuk melakukan kampanye bahaya narkoba dan alkohol dan disebar di beberapa area di Myanmar. Kegiatan pada tahun ini diikuti oleh total peserta berjumlah sekitar 57.666 remaja diseluruh Myanmar (29.747 laki-laki dan 27.952 perempuan).²⁸

Dalam pengembangan kebijakan narkoba nasional, UNODC memberikan dukungannya dalam sesi konsultasi tahun 2017 dengan memberikan bantuan berupa 5 tenaga ahli regional didalam masing-masing lima prioritas utama penyusunan dan pengembangan kebijakan nasional tentang narkoba Myanmar yang baru. Bantuan finansial dan material yang dibutuhkan antara lain, contoh dari penerapan yang ada di negara-negara yang mungkin dapat di pertimbangkan oleh Myanmar, kerangka internasional dan *best practice*, serta tren narkoba di tingkat nasional-regional oleh tenaga ahli internasional.²⁹

Dalam pengembangan pelayanan berbasis komunitas, UNODC bekerjasama

dengan Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar, Departemen Rehabilitasi mendukung pengadaan pelatihan yang disediakan oleh UNODC menggunakan paket pelatihan yang dikembangkan UNODC Asia Tenggara dan Pasifik untuk meningkatkan pelayanan berbasis komunitas bagi pengguna yang kembali dari pusat rehabilitasi sehingga dapat memandu kembali kedalam komunitas (reintegrasi sosial). Pelatihan ini diikuti oleh 41 orang terdiri dari tenaga ahli UNODC, pemimpin komunitas dan kelompok remaja serta 254 sukarelawan (197 laki-laki dan 57 perempuan) dari bulan Juli 2018 sampai Maret 2019.³⁰

Sedangkan dalam program pengembangan alternatif, Program ini memiliki 2 konsultan internasional UNODC dan 35 *full time Project Coordinator* didukung oleh *the Embassies of the United States of America (USA) and Japan*, Kementerian Luar Negeri Finlandia dan *the German Corporation for International Cooperation (GIZ)* dengan total dana adalah \$6,473,948 Dolar AS. Hal ini sangat penting guna membentuk perubahan behavioral atau tingkah laku yang diharapkan untuk mendorong masyarakat menuju ekonomi yang sah dengan memperkenalkan kepada jenis perkebunan baru dan meninggalkan perkebunan opium yang berkontribusi kepada kemiskinan petani lokal serta pemasukan yang didapat dari perkebunan opium sehingga keterlibatan masyarakat yang mendorong penggunaan narkoba dapat diperkecil.

Tahun 2017, UNODC menyediakan benih kopi, pelatihan petani dalam proses pembibitan sampai masa panen dibantu oleh

²⁸ UNICEF. 2018. "Showing the Way: Adolescents Lead Campaign to Prevent Drug Use in Myanmar". Diakses dari <https://www.unicef.org/myanmar/stories/showing-way-adolescents-lead-campaign-prevent-drug-use-myanmar> pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 12:55 WIB.

²⁹ UNODC. unodc.org. 2018. "New National Drug Policy Announced for Myanmar" diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2018/02/new-national-drug-control-policy/story.html> pada tanggal 23 Oktober 07:39 WIB.

³⁰ UNODC. 2019. "Volunteers from local community receive training for community-based care on drug use" diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2019/04/volunteers-drugs-use/story.html> pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 08:28 WIB.

tenaga ahli dan agronomis, pembukaan jalan, pembangunan gudang, pembangunan *dry mill*, tempat pembibitan, area pencucian, area pengeringan dan kantor koperasi dan pembangunan satu *coffee shop* utama yang direncanakan akan selesai pada tahun 2021.³¹ Tercatat terdapat lebih dari 1.254 petani dari 850 keluarga yang mengikuti program ini. Lahan yang telah tercakup dalam lahan pengembangan alternatif mencapai 982.69 hektar. Lahan ini terdiri dari 953 hektar lahan pohon kopi, 14.69 hektar lahan untuk teh, dan 15 hektar lahan untuk perkebunan alpukat ditambah 19 unit *nursery* atau tempat pembibitan. Pencapaian ini hampir mendekati target *performance indicators* yang menargetkan 1400 orang petani dan menargetkan 1154 hektar lahan yang digunakan dalam kegiatan pengembangan alternatif. Selain itu, UNODC juga bekerjasama dengan Kementerian Agrikultur telah membantu penerbitan 652 sertifikat hak atas tanah warga yang mencakup lebih dari 515 hektar perkebunan kopi untuk memudahkan dan memastikan keberlanjutan dan menjamin akses sampai kepada pasar.

UNODC melaporkan pendapatan petani yang mengikuti program pengembangan alternatif lebih tinggi dari pendapatan petani opium yang rata-rata mencapai 2,587 Dolar AS dalam sekali panen yang terkadang digantikan dengan meth tablet, diiringi dengan semakin jatuhnya harga opium per tahun akibat perubahan tren. Tercatat per April 2018, dari 25 ton kopi yang telah dipanen dan diproses oleh 344 petani di 3 desa di Shan, mendapatkan penghasilan mencapai 8,215 Dolar AS sampai dengan 33,489 Dolar AS. Di beberapa area, petani dapat menghasilkan sampai 2,4 *metric tons* (MT) atau 24000 kilogram kopi dengan pendapatan mencapai 5,689 dolar AS

³¹ *Ibid*

sampai 15,752 dolar AS seiring dengan semakin tingginya harga kopi.³²

Peran UNODC sebagai Arena

Pada tahun 2017, ditengah kontroversi *war on drugs*, 6 negara Mekong terdiri dari Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja dan Cina berkumpul pada konferensi United Nations-backed Regional Conference. Konferensi ini mempertemukan perwakilan UNODC dan WHO serta Menteri-menteri dari 6 negara Mekong termasuk Myanmar untuk membahas strategi dan kegiatan yang akan dilakukan diwaktu mendatang dibawah *MOU Action Plan. Training on Trainers* (ToT) juga dijadwalkan untuk diadakan dengan mengadakan pelatihan untuk melatih 1,649 orang selama 2 tahun dengan 54 aktivitas yang direncanakan. Dalam konverensi ini, UNODC juga menyediakan, mengeluarkan dan menerjemahkan manual dan buku pegangan dalam Bahasa Burma sehingga pelatih dan pendidik dapat melanjutkan pengetahuan yang mereka dapat selama pelatihan kepada orang lain.³³

Dalam memerankan perannya sebagai arena, UNODC menyediakan wadah bagi Myanmar dengan tema *Working Group Meeting for Development of Drug Control Policy in Myanmar* yang telah dirancang dari tahun 2016 sampai 2017 sebagai bentuk kerjasama UNODC dengan pemerintah Myanmar mengundang 150 perwakilan senior Myanmar, agensi PBB terkait seperti UNAIDS dan NGO yang mencakup berbagai bidang seperti pelayanan dalam bidang sosial dan kesehatan, penegakan

³² UNODC. 2019. "Sustainable Livelihoods and Development in Myanmar (2014-2019)". (New York : UNODC). Hal 1.

³³ UNODC. 2019. "Mekong Governments and UNODC Conclude Negotiations on Drug Plan" diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/November/mekong-governments-and-unodc-conclude-negotiations-on-regional-drug-plan.html> pada tanggal 23 Oktober pukul 10:55 WIB.

hukum dan organisasi lainnya, beberapa diantaranya seperti *Transnational Institute*, *Medecins du Monde*, SEEFAR, dan *Myanmar Opium Farmers Forum*.³⁴ Dikeluarkannya kebijakan baru ini sekaligus menandakan Myanmar sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengadopsi kerangka kerja UNGASS dalam level nasional.³⁵

UNODC juga menjadi wadah dalam kunjungan perwakilan negara lain ke perkebunan pengembangan alternatif Myanmar. Dari kunjungan ini, UNODC juga menjembatani perusahaan dari negara Asia Timur seperti Cina, Korea dan Jepang yang menunjukkan ketertarikan dengan produk kopi Myanmar. Hasil dari usaha ini ditunjukkan dari adanya rencana untuk mengekspor 100 ton biji kopi dari perkebunan Shan yang terdiri dari 6 kontiner dengan kesepakatan nilai mencapai 850,000 Dolar AS seiring dengan tingginya permintaan atas kopi Myanmar dengan kualitas tinggi di pasar internasional.³⁶

Peran UNODC sebagai Aktor Independen

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor independen, dapat terlihat dalam penundaan diadakannya rencana survei

pengguna narkoba nasional di Myanmar. Pada tahun 2017, sebagai bagian dari program HR, UNODC bersama pemerintah Myanmar berencana mengeluarkan proyek *National Survey on Drug Use*. Kurangnya keamanan dan stabilitas di berbagai daerah terpencil di Myanmar mengakibatkan tergesernya komunitas lokal jauh dari jangkauan.

Kontrol teritorial serta adanya keberadaan kelompok bersenjata menjadi penyebab terhalangnya agensi pemerintah maupun internasional dalam menyediakan keamanan, pelayanan dan bantuan publik termasuk UNODC. Rencana UNODC untuk mengadakan survei nasional terhambat dikarenakan terkendala dalam masalah dana serta situasi politik yang sedang terjadi di Myanmar yaitu periode pemilihan suara dan krisis di Rakhine sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan survei tersebut seperti yang telah dijadwalkan di tahun 2016 sampai 2017.

Untuk menggantikan data survei tersebut, maka data jumlah pengguna narkoba di Myanmar hanya dapat digantikan dengan mengumpulkan data dari fasilitas kesehatan pengobatan dan rehabilitasi yang terbatas. Berdasarkan data yang terkumpul dari pusat pelayanan dan pengobatan, terdapat 7.250 orang pengguna di tahun 2016 dengan sekitar 5.150 orang memakai tipe opiate (heroin dan opium) dan di tahun 2017 total keseluruhan naik menjadi 8.552 dengan 5.700 orang memakai ATS.³⁷

SIMPULAN

Berdasarkan penulisan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Myanmar terletak di wilayah yang terkenal dengan pengembangan lahan opium dan memiliki isu penggunaan narkoba diiringi dengan mudahnya akses kepada narkoba terutama

³⁴ UNODC. 2016. "UNODC and the Government of Myanmar Partner to Develop New National Drug Policy". Diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2016/10/drug-policy/story.html> pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 8:38 WIB.

³⁵ UNODC. 2018. "New National Drug Policy Announced for Myanmar". Diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2018/02/new-national-drug-control-policy/story.html> pada tanggal 23 Oktober 07:39 WIB.

³⁶ UNODC. 2018. "Mekong Drug Agency Leaders Accompany UNODC to Shan State to Meet Opium Farming Communities and Discuss Programmes and Support". Diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2018/05/shan-state-visit/story.html> pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 06:20 WIB.

³⁷ UNODC. "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia-Latest Developments and Challenges 2020". 2021. Hal 72.

opium, heroin dan ATS jenis *methamphetamine* yang penggunaannya dapat mengancam kesehatan. Ketidakefektifan dari kebijakan yang ada berbasis represif dengan kaca mata kriminal tidak mengubah tren narkoba yang ada di Myanmar. Kemiskinan, tuntutan pekerjaan dan motivasi pribadi menjadi faktor tingginya penggunaan narkoba di Myanmar. Akses menyangkut informasi mengenai narkoba terutama ATS berbasis bukti, penelitian, tidak bias dan dapat dipercaya sangat terbatas. Sehingga masyarakat di Myanmar cenderung belajar mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba melalui pengalaman yang membahayakan kesehatan.

Mayoritas tahanan adalah pengguna narkoba serta pengedar kecil akibat dari kebijakan nasional yang tidak efektif. Mengkriminalisasi pengguna narkoba hanya akan memunculkan stigma dalam komunitas dan akan berdampak kepada pengguna dan keluarga terkait sehingga tidak banyak pengguna narkoba yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan rehabilitasi.

UNODC melalui sub-program 4 : *drugs and health* mendorong implementasi penyebaran informasi dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan sukarela, berdasarkan bukti, menjunjung HAM dan penelitian sesuai dengan standar internasional harus menjadi pendekatan yang dipilih dibandingkan dengan pendekatan yang represif, terkait lingkup hukum maupun praktek di lapangan. Pendekatan yang memakai program HR sesuai dengan standar internasional yang menjunjung kesehatan masyarakat harus diterima oleh seluruh pihak dan komunitas dengan mendukung penyembuhan pengguna narkoba daripada menghukum mereka.

Peran UNODC sebagai instrumen di Myanmar mencakup peran dalam pencegahan narkoba, dalam pengembangan kebijakan nasional tentang narkoba, dalam pengembangan pelayanan berbasis

komunitas, dalam peningkatan pencegahan HIV/AIDS bagi PWID, serta dalam pengembangan alternatif untuk mencegah keterlibatan petani opium dalam produksi dan penggunaan narkoba. Sedangkan peran UNODC sebagai arena terlihat melalui berbagai diskusi dan sesi konsultasi serta peran UNODC sebagai aktor independen yang dapat membuat keputusan sendiri dalam menjalankan seluruh aktivitasnya di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

Data Resmi

- UNODC. 2019. “*Annual Report 2018*”. Hal 81. Diakses dari https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/Annual-Report_2018.pdf
- UNODC. “*UNODC’s History in Myanmar*”. Diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/history.html>
- UNODC. 2016. “UNODC and the Government of Myanmar Partner to Develop New National Drug Policy”. Diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2016/10/drug-policy/story.html>
- UNODC. 2018. “New National Drug Policy Announced for Myanmar “ diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2018/02/new-national-drug-control-policy/story.html>
- UNODC. 2018. “Mekong Drug Agency Leaders Accompany UNODC to Shan State to Meet Opium Farming Communities and Discuss Programmes and Support”. Diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/mya>

- nmar/2018/05/shan-state-visit/story.html
- UNODC. 2019. "Mekong Governments and UNODC Conclude Negotiations on DrugPlan" diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/November/mekong-governments-and-unodc-conclude-negotiations-on-regional-drug-plan.html>
- UNODC. 2019. "Sustainable Livelihoods and Development in Myanmar (2014-2019)". (New York : UNODC).
- UNODC. 2019. "Volunteers from local community receive training for community-based care on drug use" diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2019/04/volunteers-drugs-use/story>.
- UNODC. 2020. Report. "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia : Latest developments and challenges".
- UNODC. Independent Evaluation Section. "Final Independent In-Depth Evaluation : Regional Programme for Southeast Asia". 2020. (Vienna : United Nations).
- UNODC. Report. Myanmar Opium Survey 2020. Februari 2021.
- UNODC. Report. Synthetic Drugs in East and Southeast Asia. 2021.
- UNODC. unodc.org. 2018. "New National Drug Policy Announced for Myanmar" diakses dari <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2018/02/new-national-drug-control-policy/story.html>
- UNODC. "Partnerships and Funding". Diakses dari www.unodc.org/unodc/en/donors/index.html
- Buku**
- Cachia, R & Lwin, T.M. 2019. "Methamphetamine Use in Myanmar, Thailand and Southern China : Assessing Practices & Reducing Harms". (Amsterdam : Transnational Institute).
- Jackson, R & Sorensen, G. 2007. "Introduction to International Relations: Theories and Approaches" (Oxford : Oxford University Press).
- Karns, M.P, Mingst, K.A & Stiles, K.W. 2015. "International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance" 3rd ed. (Colorado : Lynne Rienner Publishers).
- Neack, L. 2008. "The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era". (Maryland : Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc).
- Perwita, A.B & Yani, Y.M. 2005. "Pengantar Hubungan Internasional". (Bandung : Remaja Rosdakarya).
- Artikel dan Jurnal**
- Kramer, Tom. 2017. "Journal of Drug Policy Analysis". The Current State of Counternarcotics Policy and Drug Reform Debates in Myanmar. Vol 10 No 1. Hal 1-14
- Mansfield, E.D & Pevehouse, J.C. "Democratization and International Organizations." *International Organization* 60, no. 1 (2006). Hlm. 901

MDM. 2018. Report. Perceptions About Drug Use and Harm Reduction in Kachin, Myanmar. Hal 27-31

Swedish International Development Cooperation Agency. (2004). *“Working in Partnership with UNODC/UNDCP”*.

Yessi Olivia. *“Jurnal Transnasional”*. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. Vol. 5 No. 1. Juli 2013. Hlm 896-898.

Website

ADB. “Poverty Data : Myanmar”. Diakses dari <https://www.adb.org/countries/myanmar/poverty#accordion-0-5>

Al Jazeera. 2019. “Myanmar cracking down on opium but conflicts push drug trade”. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/1/11/myanmar-cracking-down-on-opium-but-conflicts-push-drug-trade>

Relief Web. 2016. “Myanmar: Fighting Stigma, Preventing Disease”. Diakses dari <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-fighting-stigma-preventing-disease>

Shaw, David. 2017. “Drugs and Bullets in Myanmar”. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/features/2017/2/8/drugs-and-bullets-in-myanmar>

UNICEF. 2018. “Showing the Way: Adolescents Lead Campaign to Prevent Drug Use in Myanmar”. Diakses dari <https://www.unicef.org/myanmar/stories/showing-way-adolescents-lead-campaign-prevent-drug-use-myanmar>

WHO. *“United Nations Office on Drugs and Crime”*. Diakses dari www.who.int/violenceprevention/about/participants/unodc/en/ pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 14:21 WIB.